

BAB II

LANDASAN TEORI

2.1 Teori Agensi

Agency theory yang dikemukakan oleh Meckling, Akuntabilitas pada mulanya ditandai dengan kemunculan diferensiasi antara manajemen dan pemilik (Harianto, Kennedy, & Zarefar, 2021). Manajemen dilabeli “*agend*” sedangkan pemilik dicap “*principal*”. Keterkaitan dianggap bertalian dengan korelasi keagenan (*agency intercourse*) menurut banyak pakar responsibilitas unjuk kerja lembaga pemerintahan ialah suatu pemahaman di mana dilandaskan kepada perspektif keagenan. Pemerintah dalam hal ini berperan menjadi perantara (agen) memiliki wewenang dalam menyediakan data transparan serta akurat kepada khalayak sebagai prinsipal sehingga dengan demikian mereka dapat paham dan melakukan evaluasi jenjang berhasil atau tidak berhasil dalam menjalankan tanggungjawab dan amanah yang diemban. *Agency theory* merupakan teori yang menjelaskan hubungan antara manajemen perusahaan selaku agen dengan pemilik modal selaku pihak principal (Lesmono & Siregar, 2021).

Dalam *Agency theory* dikenal adanya kontrak kerja, yang akan mengatur proporsi utilitas masing-masing pihak dengan tetap memperhitungkan kemanfaatan secara keseluruhan. Kontrak kerja adalah seperangkat aturan yang mengatur mengenai mekanisme bagi hasil, baik yang berupa keuntungan (*return*) maupun risiko (*risk*) yang disetujui oleh *principal* dan *agen*. Selain itu, kontrak kerja yang optimal adalah kontrak yang seimbang antara principal dan agen yang secara sistematis memperlihatkan pelaksanaan kewajiban yang optimal oleh agen dan pemberian imbalan khusus oleh principal kepada agen.

Implikasi Teori Agensi terhadap Akuntabilitas kinerja pemerintah pada OPD Kota Bandar Lampung, akuntabilitas kinerja pemerintah dapat diperkuat dengan merancang sistem insentif yang tepat, menyusun kontrak kinerja yang baik, dan meningkatkan mekanisme pengawasan untuk memastikan bahwa pemerintah

bertindak sesuai dengan kepentingan masyarakat atau pemegang kepentingan. Dalam konteks penelitian ini mengintegrasikan prinsip-prinsip *Agency theory* dalam akuntabilitas kinerja OPD Kota Bandar Lampung dapat membantu meningkatkan efisiensi, efektivitas, dan transparansi dalam pengelolaan keuangan dan aset daerah, sekaligus memastikan bahwa OPD Kota Bandar Lampung bertindak sesuai dengan kepentingan pemerintah daerah dan masyarakat (Mudrikah & Ali, 2020).

2.2 Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah

2.2.1 Pengertian Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah

Menurut lembaga administrasi negara, akuntabilitas kinerja Lembaga adalah kewajiban lembaga untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan dalam melaksanakan program atau kegiatan yang telah ditugaskan oleh para pemangku kepentingan untuk mencapai misi organisasi yang dapat diukur dengan tujuan yang ditetapkan (sasaran) atau target kinerja yang ditentukan dalam laporan kinerja Lembaga yang telah disusun secara periodik. Menurut Mardiasmo pertanggungjawaban adalah tujuan utama dari reformasi sektor publik, tuntutan akuntabilitas mengharuskan Lembaga publik untuk lebih menekan pada pertanggungjawaban horizontal (*horizontal accountability*). Yang dimaksud dengan tanggung jawab kinerja instansi adalah perwujudan dari suatu instansi yang bertanggungjawab atas terselenggaranya suatu organisasi menurut suatu rencana untuk mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan untuk jangka waktu tertentu.

2.2.2 Prinsip-Prinsip Akuntabilitas

Untuk melaksanakan tanggung jawab dikantor pemerintahan, memiliki aturan yang sudah tertera adalah sebagai berikut:

1. Harus ada tanggungjawab dari administrasi dan semua staf kantor untuk melakukan eksekutif yang ditentukan untuk bertanggung jawab.
2. Harus ada kerangka yang dapat menjamin pemanfaatan asset secara andal dengan pedoman hukum yang sesuai.

3. Harus memiliki pilihan untuk menunjukkan derajat pencapaian yang sudah ditetapkan.
4. Terletak terhadap misi, untuk perolehan dan keuntungan yang akan didapatkan.
5. Tulus, berkepal dingin, lugas, dan inventif sebagai influencer dalam penyelenggaraan organisasi pemerintahan melalui penyegaran strategi dan metode perkiraan pelaksanaan dan laporan pertanggungjawaban.

2.2.3 Dimensi-Dimensi Akuntabilitas

Berikut ini beberapa dimensi dalam akuntabilitas yaitu :

1. Akuntabilitas hukum dan kejujuran adalah setiap pengaturan persetujuan terhadap peraturan dan pedoman serta pelaksanaan latihan hierarkis yang sehat untuk menghindari penyalahgunaan jabatan.
2. Akuntabilitas manajerial adalah pelaksanaan tugas-tugas otoritatif secara moneter, cakap, dan sungguh-sungguh. Terlebih lagi, dia bertanggung jawab atas interaksi dan pelaksanaan program yang ditata.
3. Akuntabilitas program adalah program dewan untuk membantu tujuan hierarkis, dan bertanggung jawab atas pilihan yang telah diambil dan dampaknya.
4. Akuntabilitas kebijakan adalah pengelolaan kas masyarakat secara finansial, cakap, dan sungguh-sungguh serta bertanggung jawab atas kekurangan pelaksanaan perkumpulan.
5. Akuntabilitas Finansial adalah penghindaran pemborosan, tumpahan, dan kekotoran, serta pembagian akibat laporan keuangan kepada masyarakat pada umumnya.

2.3 Akuntansi Sektor Publik

2.3.1 Pengertian Akuntansi Sektor Publik

Menurut (Mardiasmo, 2021) Akuntansi sektor publik adalah cabang dari akuntansi yang fokus pada entitas dan organisasi yang berhubungan dengan domain publik, seperti pemerintah, lembaga-lembaga publik, dan badan usaha

milik negara. Tujuannya adalah untuk menghasilkan informasi keuangan yang akurat dan relevan agar dapat dipertanggungjawabkan. Akuntansi sektor publik memiliki peran penting dalam meningkatkan transparansi dalam pengelolaan keuangan entitas publik, serta dalam memberikan informasi yang diperlukan untuk mengelola secara tepat, efisien, dan ekonomis atas suatu operasi dan alokasi sumber daya yang dipercayakan kepada organisasi.

Menurut (Sari, 2015) Akuntansi sektor publik adalah proses pembukuan, pencatatan, klasifikasi, analisis, peringkasan, serta komunikasi dan interpretasi informasi keuangan yang dihasilkan oleh entitas berhubungan dengan domain publik. Akuntansi sektor publik memiliki berbagai jenis dan ruang lingkup, seperti manajemen keuangan publik, perencanaan makroekonomi, mobilisasi pendapatan, penganggaran, realisasi anggaran, dan audit.

Dari definisi-definisi di atas Akuntansi Sektor Publik dapat dinyatakan sebagai sebuah proses untuk mengelompokkan, mencatat, mengkategorikan, menganalisis serta membuat laporan transaksi keuangan dana untuk sebuah lembaga publik yang mengarsipkan informasi keuangan bagi pihak yang membutuhkannya untuk digunakan saat pemungutan sebuah ketentuan, yang akhirnya akan dipertanggungjawabkan kepada publik sehingga dalam pengelolaannya membutuhkan keterbukaan dan akuntabilitas.

Organisasi-organisasi sektor publik sering dijumpai dalam kehidupan. Dalam kehidupan sehari-hari, seseorang cenderung berurusan dengan instansi pemerintah, seperti departemen pendidikan, departemen tenaga kerja, kantor pencatatan sipil, atau kepolisian. Dan yang juga termasuk organisasi sektor publik adalah partai-partai politik dan LSM-LSM di berbagai bidang.

Terdapat beberapa indikator dalam akuntansi sektor publik menurut (Yosep & Indriasih, 2020) meliputi:

1. Tingkat Transparansi Keuangan

2. Kualitas Laporan Keuangan
3. Ketaatan Terhadap Standar Akuntansi
4. Efektivitas Pengelolaan Keuangan
5. Kinerja dan Efisiensi Program
6. Ketepatan Pengeluaran Anggaran
7. Ketepatan dan Kualitas Pengungkapan Informasi
8. Penerapan Prinsip *Good Governance*

Setiap indikator ini membantu dalam menilai dan mengevaluasi kinerja entitas publik serta memberikan gambaran yang lebih komprehensif tentang bagaimana pengelolaan keuangan dan pelayanan publik dijalankan (Yosep & Indriasih, 2020).

Untuk menghasilkan laporan keuangan sektor publik yang relevan dan dapat diandalkan, terdapat beberapa kendala yang dihadapi akuntansi sektor publik. Hambatan tersebut adalah sebagai berikut :

1. Objektivitas

Objektivitas merupakan kendala utama dalam menghasilkan laporan keuangan yang relevan. Laporan keuangan disajikan oleh manajemen untuk melaporkan kinerja yang telah dicapai oleh manajemen selama periode waktu tertentu kepada pihak eksternal yang menjadi stakeholder organisasi. Seringkali terjadi masalah dalam objektivitas laporan kinerja yang disebabkan oleh adanya benturan kepentingan, yaitu antara kepentingan manajemen dengan kepentingan stakeholder. Pihak manajemen tidak selalu bertindak untuk kepentingan stakeholder, namun seringkali manajemen bertindak untuk memaksimalkan kesejahteraan mereka dan mengamankan posisi mereka tanpa memandang bahaya yang ditimbulkan terhadap stakeholder lain, misalnya karyawan, investor, kreditor dan masyarakat.

2. Konsistensi

Konsistensi mengacu pada penggunaan metode atau teknik akuntansi yang sama untuk menghasilkan laporan keuangan organisasi selama

beberapa periode waktu secara berturut-turut. Tujuannya adalah agar laporan keuangan dapat diperbandingkan kinerjanya dari tahun ke tahun. Konsistensi penerapan metode akuntansi merupakan hal yang sangat penting karena organisasi memiliki orientasi jangka panjang, sedangkan laporan keuangan hanya melaporkan kinerja selama satu periode. Oleh karena itu agar tidak terjadi keterputusan proses evaluasi kinerja organisasi oleh pihak eksternal, maka organisasi perlu konsisten dalam menerapkan metode akuntansinya.

3. Daya Banding

Laporan keuangan sektor publik hendaknya dapat diperbandingkan antar periode waktu dan dengan instansi lain sejenisnya. Dengan demikian daya banding berarti laporan keuangan dapat digunakan untuk membandingkan kinerja organisasi dengan organisasi lain yang sejenis. Kendala daya banding terkait dengan objektivitas karena semakin objektif suatu laporan keuangan maka akan semakin tinggi daya bandingnya karena dengan dasar yang sama akan dapat dihasilkan laporan yang berbeda. Selain itu, daya banding juga terkait dengan konsistensi. Adanya beberapa alternatif penggunaan metode akuntansi juga dapat menyulitkan tercapainya daya banding.

4. Tepat Waktu

Laporan keuangan harus disajikan tepat waktu agar dapat digunakan sebagai dasar pengambilan keputusan ekonomi, sosial dan politik serta untuk menghindari tertundanya pengambilan keputusan tersebut. Kendala ketepatan waktu penyajian laporan terkait dengan lama waktu penyajian laporan keuangan, maka akan semakin baik untuk pengambilan keputusan. Permasalahannya adalah semakin banyak kebutuhan informasi, makasemakin banyak pula waktu yang dibutuhkan untuk menghasilkan berbagai informasi tersebut. Laporan keuangan mungkin disajikan tidak tepat waktu sehingga menghasilkan berbagai informasi tersebut. Laporan keuangan mungkin disajikan tidak tepat waktu sehingga tidak relevan untuk pengambilan keputusan meskipun disajikan lebih awal.

5. Ekonomis dalam Penyajian Laporan

Penyajian laporan keuangan membutuhkan biaya. Semakin banyak informasi yang dibutuhkan semakin besar pula biaya yang dibutuhkan. Kendala ekonomis dalam penyajian laporan keuangan dapat berarti bahwa manfaat yang diperoleh harus lebih besar dan biaya yang dikeluarkan untuk menghasilkan laporan tersebut.

Dalam buku "Akuntansi Sektor Publik" (Nordiawan & Hertianti, 2010) menyebutkan tujuan dan fungsi laporan keuangan sektor publik sebagai berikut:

1. Kepatuhan dan Pengelolaan (*compliance and stewardship*). Laporan keuangan digunakan untuk memberikan jaminan kepada pengguna laporan keuangan dan pihak otoritas penguasa bahwa pengelolaan sumber daya telah dilakukan sesuai dengan ketentuan hukum dan peraturan lain yang telah ditetapkan.
2. Akuntabilitas dan pelaporan retrospektif (*accountability and retrospective reporting*). Laporan keuangan digunakan sebagai bentuk pertanggungjawaban kepada publik. Laporan keuangan digunakan untuk memonitor kerja dan mengevaluasi manajemen, memberikan dasar untuk tren antar kurun waktu pencapaian atas tujuan yang telah ditetapkan, dan membandingkannya dengan kinerja organisasi lain yang sejenis jika ada.
3. Perencanaan dan informasi otorisasi (*planning and authorization information*). Laporan keuangan berfungsi memberikan dasar perencanaan kebijakan dan aktivitas di masa mendatang. Laporan keuangan berfungsi memberikan informasi pendukung mengenai otoritas penggunaan data.
4. Kelangsungan organisasi (*viability*). Laporan keuangan berfungsi membantu pengguna dalam menentukan apakah suatu organisasi atau unit kerja dapat meneruskan menyediakan barang dan jasa (pelayanan) dimasa mendatang.

5. Hubungan masyarakat (*public relation*). Laporan keuangan berfungsi memberikan kesempatan kepada organisasi untuk mengemukakan pernyataan atas prestasi yang telah dicapai.

2.4 Kualitas Laporan Keuangan

2.4.1 Pengertian Kualitas Laporan Keuangan

Menurut komite standar akuntansi pemerintah Indonesia kualitas laporan keuangan merupakan laporan keuangan yang berkulaitas, laporan keuangan pemerintah yang dikatakan memenuhi kualitas yang diinginkan jika telah memenuhi unsur kualitatif laporan keuangan yaitu ukuran-ukuran normatif yang perlu di ciptakan dalam informasi akuntansi sehingga dapat memenuhi tujuannya.

Menurut (Erlina, 2013) dan Peraturan Pemerintah nomor 71 tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah mengemukakan bahwa, karakteristik kualitatif laporan keuangan adalah ukuran-ukuran normatif yang perlu diwujudkan dalam infromasi akuntansi sehinga dapat memenuhi tujuannya.

2.4.2 Faktot-Faktor yang Mempengaruhi Kualitas Laporan Keuangan

Menurut (Saidin, 2007) menyebutkan bahwa salah satu faktor yang mempengaruhi kualitas pelaporan keuangan pada sektor swasta adalah mekanisme pengawasan perusahaan. Hal serupajuga dinyatakan oleh (Bawhede, 2001) tentang faktor potensial yang dapat mempengaruhi pelaporan keuangan adalah kualitas dari mekanisme tata kelola eksternal perusahaan (seperti: kualitas audit), dan mekanisme tata kelola internal perusahaan (seperti: kualitas dewan direksi).

Selain itu keputusan manajemen dan regulasi yang berkaitan dengan pelaporan keuangan, mekanisme tata kelola internal dan eksternal perusahaan juga akan mempengaruhi pelaporan keuangan. Penilaian kewajaran informasi yang disajikan dalam laporan keuangan pemerintah daerah salah satunya berdasarkan kesesuaian terhadap standar akuntansi pemerintah yang ada. Oleh karena itu, salah satu topik menarik dalam akuntansi pemerintahan adalah berkaitan dengan standar akuntansi pemerintahan itu sendiri.

Menurut Chan (2003) dari perspektif riset, teori yang mendasari standar akuntansi pemerintahan sebagian besar bersifat normatif berbeda dengan pengembangan teori akuntansi positif pada sektor swasta. Selanjutnya, Sutcliffe (2003) mengatakan bahwa dari berbagai perubahan yang terjadi di akuntansi pemerintahan beberapa tahun terakhir, lahirnya *International Public Sector Accounting Standards* (IPSAS) merupakan perubahan yang paling penting. Namun ternyata, IPSAS menyerupai standar akuntansi bisnis yang disusun oleh *International Accounting Standard Board* (IASB). Ketentuan teknisnya dirancang oleh akuntan untuk akuntan, bukan untuk pembuat aturan publik yang akan sangat menentukan kesuksesan implementasi IPSAS tersebut. Akibatnya, IPSAS memiliki beberapa nilai simbolik.

Hal ini dibuktikan dengan penelitian yang dilakukan oleh Carpenter dan Feroz (1992) yang menunjukkan bahwa prinsip-prinsip akuntansi yang berlaku umum (*general accepted accounting principles*) hanyalah sebagai simbol legalitas saja di New York. Di Indonesia, Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) telah ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 24/2005 menjadi PP 71/ 2010 yang disusun oleh Komite Standar Akuntansi Pemerintahan (KSAP). KSAP sendiri merupakan salah satu kompartemen yang berada di bawah Ikatan Akuntan Indonesia (IAI). Terbitnya SAP ini juga mengukuhkan peran penting akuntansi dalam pelaporan keuangan di pemerintahan. Jadi dapat dikatakan Indonesia memasuki babak baru dalam pelaporan keuangan kegiatan pemerintah Indonesia.

2.5 Penelitian Terdahulu

Dalam rangka mendukung pengembangan hipotesis pada penelitian ini, dibawah ini merupakan tabel yang menjabarkan hasil penelitian yang relevan dengan variabel dalam penelitian ini.

Tabel 2.1
Peneliti Terdahulu

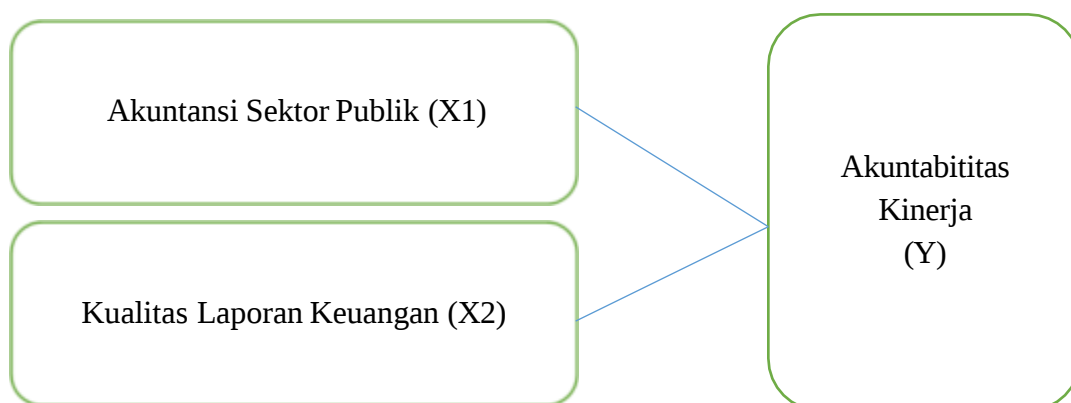
No	Penelitian dan Tahun	Judul Penelitian	Variabel Penelitian	Hasil Penelitian
1.	Christian Timotius Peilouw,Dwi Dayanti Oktavia, Agusta Amanda Wulandari, Chyntia Febriliany Latua (2023)	Pengaruh penerapan akuntansi sektor publik dan kualitas laporan keuangan terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (studi pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	Variabel dependen yang digunakan yaitu akuntabilitas kinerja instansi pemerintah. Sedangkan variabel independen yaitupenerapan akuntansi sektor publik dan kualitas laporan keuangan	Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa secara parsial penerapan akuntansi sektor publik berpengaruh terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, dan secara parsial kualitas laporan keuangan berpengaruh terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah. Sedangkan penerapan akuntansi sektor publik dan kualitas laporan keuangan secara simultan berpengaruh signifikan terhadap Akuntabilitas kinerja instansi pemerintah.
2.	Aulia, Oktaviani (2021)	Pengaruh Penerapan Akuntansi Sektor Publik Dan Pengawasan Kualitas Laporan Keuangan Terhadap	Variabel independen: Akuntansi Sektor Publik Dan Pengawasan Kualitas Laporan	Hasil penelitian menunjukan bahwa pada organisasi perangkat daerah kota pekan baru penerapan akuntansi sektor

		Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Pada Organisasi Perangkat Daerah	Keuangan. Sedangkan Variabel Dependen: Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	publik berpengaruh signifikan terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah baik secara parsial maupun simultan
3.	Putri Retno Handayani dan Muhammad Agus Sudrajat (2024).	Pengaruh impletasi akuntansi sektor publik dan kualitas keuangan pemerintah terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah daerah dengan sistem pengendalian intren sebagai variabel moderasi	Variabel dependen yang digunakan yaitu akuntabilitas kinerja instansi pemerintah daerah. Sedangkan variabel independen terdiri dari akuntansi sektor publik dan kualitas keuangan pemerintah	Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa variabel Penerapan Akuntansi Sektor Publik dan Kualitas Laporan Keuangan mempunyai pengaruh positif dan signifikan terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Daerah
4.	Fikamudrikah dan Karnilaali (2020)	Pengaruh Implementasi Standar Akuntansi Pemerintah Dan Kualitas Laporan Keuangan Terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Dengan Komitmen Organisasi Sebagai	Variabel independen: standar akuntansi pemerintah dan kualitas laporan keuangan. Variabel Dependen: akuntabilitas kinerja instansi	Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Implementasi standar akuntansi pemerintah tidak berpengaruh terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah. Sedangkan kualitas laporan keuangan berpengaruh terhadap

		Variabel	pemerintah	akuntabilitas kinerja instansi pemerintah
5.	Novita Fitriyani dan Helmi Herawati (2020)	Pengaruh Penerapan standar akuntansi pemerintah berbasis akrual, sistem pengendalian intren dan kualitas laporan keuangan terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah	Variabel Independen: Ukuran perusahaan, rasio leverage, rasio likuiditas, rasio net profit margin, status perusahaan. Variabel Dependen: kelengkapan pengungkapan laporan keuangan tahun 2006-2008	Hasil dan pengujian hipotesis yang telah diuraikan maka berbasis akrual akuntansi berpengaruh signifikan dengan nilai 0,714 terhadap akuntabilitas kinerja pemerintahan pada Inspektorat Kabupaten Bengkulu Tengah

2.6 Kerangka Berfikir

Kerangka berfikir merupakan penjelasan secara teoritis bertautan antar variabel yang akan diteliti. Berdasarkan uraian yang telah dijelaskan, maka kerangka pemikiran dalam penelitian ini dapat digunakan dalam skema berikut :



Gambar 2 1 Kerangka Berfikir

2.7 Bangunan Hipotesis

Hipotesis merupakan jawaban sementara terhadap rumusan masalah. Karena sifatnya masih sementara, maka perlu dibuktikan kebenarannya melalui data empirik yang terkumpul (Sugiyono, 2019). Penelitian ini bertujuan untuk memberikan bukti empiris Penerapan Akuntansi Sektor Publik dan Kualitas Laporan Keuangan terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

2.7.1 Pengaruh Penerapan Akuntansi Sektor Publik Terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah

Akuntansi sektor publik merupakan suatu entitas yang aktivitasnya berkaitan dengan usaha untuk menghasilkan barang dan pelayanan publik yang bermanfaat untuk memenuhi kebutuhan dan hak publik. Dalam beberapa hal, lembaga sektor publik memiliki kesamaan dengan swasta. Keduanya sama-sama menggunakan sumber daya yang sama dan proses pengendalian yang hampir mirip. Namun dalam tugas tertentu, sektor publik tidak dapat digantikan oleh swasta seperti halnya pada fungsi pemerintahan. Akuntabilitas Sektor Publik adalah bentuk kewajiban pertanggungjawaban seseorang (pimpinan, pejabat atau pelaksana) atau suatu organisasi kepada pihak yang memiliki hak atau kewenangan untuk meminta keterangan terkait kinerja atau tindakan dalam menjalankan misi dan tujuan organisasi dalam bentuk pelaporan yang telah ditetapkan secara periodik.

Berbagai penelitian tentang pengaruh akuntansi Sektor Publik Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah pada Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah telah dilakukan salah satunya adalah (Peilow, Oktavia, Wulandari, & Latua, 2023) yang menyatakan bahwa secara parsial, penerapan akuntansi sektor publik memengaruhi kinerja akuntabilitas lembaga pemerintah. Menurut (Aulia, 2021) akuntansi sektor publik berpengaruh signifikan terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah baik secara parsial dan simultan.

Oleh karena itu hipotesis yang akan diajukan dalam penelitian ini yaitu :

H₁: Penerapan Akuntansi Sektor Publik berpengaruh terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah

2.7.2 Pengaruh Kualitas Laporan Keuangan Terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah

Akuntansi sektor publik merupakan suatu entitas yang aktivitasnya berkaitan dengan usaha untuk menghasilkan barang dan pelayanan publik yang bermanfaat untuk memenuhi kebutuhan dan hak publik. Dalam beberapa hal, lembaga sektor publik memiliki kesamaan dengan swasta. Keduanya sama-sama menggunakan sumber daya yang sama dan proses pengendalian yang hampir mirip. Namun dalam tugas tertentu, sektor publik tidak dapat digantikan oleh swasta seperti halnya pada fungsi pemerintahan. Laporan keuangan adalah bentuk pertanggungjawaban pengelolaan keuangan negara dan daerah selama satu periode (Dewi & Sapari, 2020). Laporan keuangan yang ideal adalah laporan keuangan yang memenuhi karakteristik kualitatif dan juga bias dipertanggungjawabkan kinerja keuangannya kepada publik, karena laporan keuangan yang dihasilkan nantinya akan dimanfaatkan bagi seluruh entitas sebagai pedoman dalam membuat kebijakan- kebijakan dan keputusan dalam penyelenggaraan pemerintahan.

Penelitian yang dilakukan oleh (Aulia, 2021) pengawasan kualitas laporan keuangan secara parsial tidak berpengaruh signifikan, sedangkan secara simultan berpengaruh signifikan terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah. Sedangkan menurut (Hikmawati, 2022) kualitas laporan keuangan berpengaruh signifikan atau positif terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah.

Oleh karena itu hipotesis yang akan diajukan dalam penelitian ini yaitu :

H₂: Kualitas Laporan Keuangan berpengaruh Terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah